

# Islam dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Prospek Perdamaian pada Konflik Iran dan Israel

Malik Rahmatullah<sup>1\*</sup>, Burhanuddin Siregar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>UIN Syarif Hidayatullah, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : [milanistikhu@gmail.com](mailto:milanistikhu@gmail.com)



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2259 - 2270

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3304>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3304>

Article History:

Received: 09-07-2026

Revised: 14-08-2026

Accepted: 19-08-2026

**Abstract :** *The escalation of the Iran–Israel conflict during the 2023–2025 period has affected global stability and Indonesia’s national interests, particularly in the areas of energy, economy, and security. This issue is significant because Indonesia must balance Islamic values as a moral foundation with its free and active foreign policy principle in responding to the geopolitical dynamics of the Middle East. This study aims to analyze the influence of Islamic values, namely al-’adālah (justice), amar ma’rūf nahi munkar (enjoining good and forbidding evil), and al-ukhuwwah al-islāmiyyah (Islamic brotherhood), on Indonesia’s foreign policy toward the Iran–Israel conflict, while examining the continuity of the free and active foreign policy under the administrations of Joko Widodo (2023–2024) and Prabowo Subianto (2025). This study employs a qualitative approach using Critical Discourse Analysis (CDA) of official documents from the Ministry of Foreign Affairs, speeches by the President and the Minister of Foreign Affairs, United Nations resolutions, statements of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC), and relevant academic literature. The findings indicate that Islamic values serve as both a moral foundation and a source of soft power in Indonesia’s diplomacy. While the Joko Widodo administration emphasized a normative and humanitarian approach, the Prabowo Subianto administration adopted a more pragmatic orientation without abandoning the free and active foreign policy principle. These findings demonstrate that Islamic values continue to provide an ethical framework that strengthens the consistency and adaptability of Indonesia’s foreign policy in addressing international conflicts.*

**Keywords :** *Islam, Iran–Israel, Foreign Policy*

**Abstrak :** Eskalasi konflik Iran–Israel pada periode 2023–2025 memengaruhi stabilitas global dan berdampak pada kepentingan nasional Indonesia di bidang energi, ekonomi, dan keamanan. Kondisi ini penting dikaji karena Indonesia harus menjaga keseimbangan antara nilai-nilai Islam sebagai landasan moral dan prinsip politik luar negeri bebas–aktif dalam merespons dinamika geopolitik kawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh nilai-nilai Islam, yaitu *al-’adālah* (keadilan), *amar ma’rūf nahi munkar*, dan *al-ukhuwwah al-islāmiyyah*, terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dalam konflik Iran–Israel, serta mengkaji kontinuitas penerapan prinsip bebas–aktif pada pemerintahan Joko Widodo (2023–2024) dan Prabowo Subianto (2025). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *critical discourse analysis* terhadap dokumen resmi Kementerian Luar Negeri, pidato Presiden dan Menteri Luar Negeri, resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, pernyataan Organisasi Kerja Sama Islam, serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam berfungsi sebagai landasan moral sekaligus instrumen *soft power* dalam diplomasi Indonesia. Pemerintahan Joko Widodo lebih menekankan pendekatan normatif dan kemanusiaan, sedangkan pemerintahan Prabowo Subianto cenderung mengedepankan pendekatan pragmatis tanpa meninggalkan prinsip bebas–aktif. Temuan ini menegaskan bahwa nilai-nilai Islam tetap menjadi dasar etis yang memperkuat konsistensi dan fleksibilitas kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi konflik internasional.

**Kata Kunci :** Islam, Iran - Israel, Kebijakan

## PENDAHULUAN

Konflik Iran-Israel telah mengalami eskalasi dramatis sejak 2023, bermula dari serangan Hamas 7 Oktober 2023 dan mencapai titik kritis dengan serangan Israel terhadap kedutaan besar

Iran di Damaskus pada April 2024 (Blankenship, 2024). Serangan ini tidak hanya melanggar Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, tetapi juga menciptakan preseden berbahaya dalam hukum internasional. Bagi Indonesia, konflik ini tidak hanya menyangkut kepentingan ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek moral dan ideologis sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Indonesia memiliki komitmen historis menjadikan nilai-nilai Islam sebagai fondasi kebijakan luar negerinya (Aqsha, 2023). Prinsip *al-ukhuwwah* (persaudaraan), *al-'adālah* (keadilan), dan *Amarū bil-ma'rūf wa nahau 'anil-munkar* (menegakkan kebaikan/mencegah kemungkaran) terinternalisasi dalam diplomasi Indonesia, mulai dari Konferensi Asia-Afrika 1955 hingga keanggotaan aktif di *Organization of the Islamic Conference* (OIC) (S. M. Setiawati, 2024). Dalam konflik Iran-Israel, identitas keislaman ini termanifestasi melalui dukungan konsisten terhadap Palestina dan penolakan agresi militer Israel, sebagaimana tercermin dalam pidato resmi pemerintah dan dokumen diplomasi. Pendekatan Indonesia tidak semata didorong solidaritas agama, melainkan juga upaya membangun *soft power* sebagai jembatan perdamaian (*bridge builder*) di dunia Islam. Pasca-eskalasi konflik Juni 2025, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono secara eksplisit menyerukan de-eskalasi, menekankan pentingnya penyelesaian damai berbasis hukum internasional (Costa, 2025a).

*French Institute of International Relations* dalam artikel "*Indonesia and the Palestinian Cause*" oleh Peterson mencatat bahwa militansi dukungan Indonesia terhadap Palestina bersumber dari prinsip politik "bebas dan aktif" dan sejarah nasionalisme anti-penindasan sejak era Sukarno, yang terus berlanjut hingga pemerintahan Prabowo Subianto (Peterson, 2025). Sementara itu, *Maloney* menggarisbawahi bahwa posisi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar memberi legitimasi moral yang kuat dalam mendukung perdamaian Timur Tengah, meski kapasitas diplomatiknya terbatas (Maloney, 2025). Ghiselli menyoroti bahwa konflik Israel-Iran merupakan ujian strategis bagi negara-negara *middle power* seperti Indonesia dalam menyeimbangkan identitas keagamaan dan realpolitik. Indonesia memiliki ekspektasi internasional tinggi terkait perannya sebagai jembatan perdamaian, namun perlu strategi diplomasi yang berkelanjutan agar efektivitasnya tidak berkurang.

Sejumlah informasi kunci terkait tema ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Di satu sisi, publik dan elit politik Indonesia meminta negara memainkan peran lebih proaktif dalam meredakan konflik Iran-Israel (Amara, 2025). Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan agar Indonesia, sebagai pelopor Non-Blok dan negara Muslim terbesar, berperan aktif menjadi wasit perdamaian dalam konflik Iran-Israel (Prameswari, 2025). Legislatur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mengimbau agar pemerintah memanfaatkan forum OIC dan *United Nations* untuk menginisiasi gencatan senjata dan dialog damai (Amara, 2025). Di sisi lain, Indonesia belum memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel karena dukungan tradisional terhadap Palestina, sehingga cara berperan dalam konflik ini terbatas. Situasi ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana nilai-nilai Islam yang dianut Indonesia diterapkan dalam kebijakan luar negeri untuk mendukung perdamaian?

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa Indonesia konsisten menekankan peran perdamaian dan hukum internasional dalam kebijakan Timur Tengah, terutama Palestina. Correa-Lopera et al. menggambarkan kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono menampilkan Islam moderat, aktif mendukung Palestina, dan menutup hubungan resmi dengan Israel. Hal ini sejalan dengan survei bahwa 87,4% penduduk Indonesia Muslim menekan pemerintah menolong Palestina (Correa-Lopera, 2019). Elbahnasawy menegaskan Peran identitas Islam juga terlihat di level transnasional sebagai negara Muslim terbesar, Indonesia diharapkan oleh OIC dan negara Islam

lain untuk memimpin penyelesaian konflik (Iran, Israel) (Elbahnasawy, 2020). Alles menegaskan Islam menyediakan basis normatif kuat bagi kebijakan Indonesia, meski bukan satu-satunya faktor (Alles, 2015).

Zaini menyoroti perubahan konteks strategis. Jabatan presiden Joko Widodo lebih pragmatis Joko Widodo memposisikan Islam sebagai *constraint*, bukan motivator utama *foreign policy* ketika konflik dengan kepentingan nasional (Zaini, 2019). Setiawati menyatakan bahwa Joko Widodo menolak ikut *Islamic Military Alliance* Saudi dan memilih prinsip bebas aktif demi mengurangi risiko, bukan karena meninggalkan Islam (S. M. Setiawati, 2024). Penelitian Stutzer, Baltensperger, dan Meier menyatakan bahwa dalam satu pandangan konstruktivis nilai-nilai Islam dan solidaritas keagamaan membentuk agenda luar negeri, dalam pandangan lain realitas kepentingan nasional dan kekuatan material lebih menentukan (Stutzer et al., 2019).

Sedikit kajian terdahulu yang secara khusus membahas hubungan antara nilai Islam dan kebijakan luar negeri Indonesia dalam kasus Iran–Israel. Kebanyakan penelitian sebelumnya fokus pada konflik Israel–Palestina atau proses perdamaian di Afghanistan. Halida Maulidia dalam studinya terhadap dukungan Indonesia terhadap perdamaian di Afghanistan menemukan adanya dua wacana utama: wacana dominan yang memandang nilai-nilai Islam selaras dengan prinsip kebijakan luar negeri Republik Indonesia dapat mendukung perdamaian, dan wacana marginal yang menyatakan agama tidak signifikan karena dasar kebijakan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan politik bebas aktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa selama nilai-nilai Islam sejalan dengan prinsip kebijakan luar negeri, maka Islam dapat digunakan sebagai aset diplomasi Indonesia. Temuan tersebut menunjukkan perdebatan teoretis apakah Islam bertindak sebagai motivator atau hanya legitimasi kebijakan (Maulidia, 2022). Namun, belum ada penelitian terperinci yang mengaitkan konsep-konsep keadilan, *Amarū bil-ma'rūf wa nahau 'anil-munkar*, dan *al-ukhuwwah* secara eksplisit dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia menghadapi konflik Iran–Israel. Hal inilah yang menjadi celah (gap) kajian, implementasi norma Islam dalam resolusi konflik tersebut masih kurang dieksplorasi.

Faktor kepentingan nasional mencakup menjaga stabilitas kawasan, melindungi keselamatan warga negara Indonesia di Timur Tengah, serta citra internasional RI. Sebagai negara Muslim terbesar, Indonesia diharapkan oleh komunitas Islam global untuk memimpin penyelesaian masalah umat (S. M. Setiawati, 2024). Hal ini diperkuat dengan seruan anggota DPR yang meminta pemerintah memastikan keselamatan WNI di Iran sebagai prioritas (Amara, 2025). Pada tingkat diplomatik, Indonesia memadukan prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan aspirasi moral Islam. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengedepankan diplomasi multilateral dan penyelesaian damai, sesuai prinsip keadilan internasional (Costa, 2025b). Meski demikian, terdapat kesenjangan antara idealisme tersebut dan realitas praktis: Indonesia belum bisa berperan langsung sebagai mediator karena ketiadaan hubungan dengan Israel, dan terbagi antara menegakkan solidaritas umat Islam dengan menjaga kebijakan luar negeri yang bebas aktif (Maulidia, 2022). Sebagaimana disinggung dalam artikel “*Southeast Asia Is Starting to Choose: Why the Region Is Leaning Toward China*” oleh Khong dan Liow negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, kini dihadapkan pada pilihan strategis dalam menghadapi rivalitas kekuatan besar. Ini menjadikan peran diplomasi Indonesia dalam konflik Timur Tengah tidak hanya bernilai identitas, tetapi juga signifikan dalam proyeksi norma dalam politik global (Khong & Liow, 2025).

Dengan mempertimbangkan tinjauan di atas, jelas bahwa topik Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam upaya merespons konflik Iran–Israel, menjadi penting dan belum tuntas dibahas. Kesenjangan kajian ini terlihat dari belum terjawabnya pertanyaan bagaimana nilai keadilan (*‘adl*), *amarū bil-ma'rūf wa nahyu 'anil-munkar*, dan *al-ukhuwwah*

terinternalisasi dalam kebijakan resmi Republik Indonesia, serta bagaimana prinsip bebas–aktif direinterpretasi dalam konteks geopolitik terbaru. Urgensitas penelitian ini semakin kuat karena eskalasi konflik yang mulai muncul sejak 2023 dan memuncak pada 2025 menempatkan Indonesia pada posisi diplomatik yang strategis namun dilematis: di satu sisi menegaskan identitas normatif Islam dan komitmen perdamaian, di sisi lain menghadapi keterbatasan hubungan diplomatik formal dengan Israel serta tekanan kepentingan strategis dari negara besar dan kawasan. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan akademik dalam literatur tentang hubungan agama dan diplomasi, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam memahami reorientasi kebijakan luar negeri Indonesia di era Jokowi dan Prabowo dalam menghadapi krisis global kontemporer.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode utama *discourse analysis*. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap makna, narasi, dan konstruksi identitas yang tercermin dalam kebijakan luar negeri Indonesia (Rithcie & Lewis, 2003, pp. 2–3). *Discourse analysis* berfokus pada bagaimana bahasa, simbol, dan narasi digunakan dalam dokumen resmi dan pernyataan diplomatik untuk membentuk realitas politik. Metode ini memposisikan peneliti untuk menafsirkan wacana kebijakan secara kritis, mengidentifikasi nilai-nilai Islam seperti keadilan, *amarū bil-ma'rūf wa nahau 'anil-munkar*, dan *al-ukhuwwah* sebagaimana diartikulasikan dalam konteks konflik Iran–Israel. Pendekatan ini memberikan kerangka analisis yang memungkinkan pemetaan hubungan antara nilai normatif dan strategi diplomasi Indonesia, sekaligus membedakannya dari penelitian terdahulu yang hanya menitikberatkan pada aspek normativitas semata (Neumann, 2008, pp. 61–62).

Penelitian ini menggunakan sumber utama berupa dokumen resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia seperti Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri, naskah pidato Presiden dan Menteri Luar Negeri pada forum internasional (Majelis Umum *United Nations*, OIC), serta siaran pers resmi pemerintah terkait isu Timur Tengah, khususnya konflik Iran–Israel. Selain itu, digunakan resolusi dan dokumen sidang *United Nations*, komunike resmi OIC, serta arsip pernyataan diplomatik Indonesia yang dipublikasikan di situs resmi kementerian. Serta data sekunder yang mencakup berbagai informasi yang diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu, baik berupa buku, jurnal akademik, laporan lembaga internasional, maupun pemberitaan dari media cetak dan daring yang kredibel.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen dan studi pustaka. Studi dokumen difokuskan pada sumber utama berupa dokumen resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia seperti Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri, naskah pidato Presiden dan Menteri Luar Negeri pada forum internasional (Majelis Umum *United Nations*, OIC), serta siaran pers resmi pemerintah terkait isu Timur Tengah, khususnya konflik Iran–Israel. Selain itu, digunakan pula resolusi dan dokumen sidang *United Nations*, komunike resmi OIC, serta arsip pernyataan diplomatik Indonesia yang dipublikasikan di situs resmi kementerian. Sementara itu, sumber sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup penelitian terdahulu, buku, jurnal akademik, laporan lembaga internasional, serta pemberitaan dari media cetak dan daring yang kredibel. Data sekunder ini digunakan untuk memberikan konteks, memperkuat analisis, dan membandingkan temuan penelitian dengan kajian ilmiah serta pandangan para pakar hubungan internasional.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *discourse analysis* (analisis wacana). Metode ini merupakan bagian dari analisis kualitatif yang berfokus pada interpretasi bahasa,

narasi, dan simbol sebagai bentuk komunikasi politik dan diplomatik. *Discourse analysis* berangkat dari paradigma konstruktivis yang melihat dunia sosial dibentuk oleh wacana dan pemahaman intersubjektif, di mana bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampai pesan, tetapi juga sebagai instrumen yang membentuk realitas politik dan kebijakan luar negeri (Hardy et al., 2004).

Hardy et al. menjelaskan *discourse analysis* sebagai metodologi untuk menganalisis fenomena sosial yang bersifat kualitatif, interpretatif, dan konstruktivis, menekankan bahwa wacana mengandung seperangkat asumsi yang membentuk cara dunia dipahami melalui bahasa (Hardy et al., 2004). Neumann mengemukakan bahwa peneliti Hubungan Internasional yang menggunakan *discourse analysis* harus memahami konteks budaya dan politik secara mendalam agar dapat menafsirkan wacana dengan tepat. Neumann membagi proses *discourse analysis* dalam tiga tahap (Neumann, 2008, pp. 61–62).

Proses analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, membatasi fokus wacana yang dikaji, yakni wacana Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia terkait prospek perdamaian konflik Iran–Israel, dengan memperhatikan kerangka waktu dan konteks geopolitik yang relevan. Kedua, mengidentifikasi representasi wacana berupa gagasan, ide, dan nilai-nilai Islam seperti keadilan, *amarū bil-ma'rūf wa nahau 'anil-munkar*, dan *al-ukhuwwah* sebagaimana tercermin dalam dokumen kebijakan, pidato, dan pernyataan diplomatik Indonesia. Ketiga, mengungkap struktur dan dinamika wacana untuk melihat perubahan, dominasi, atau marginalisasi ide tertentu, dengan mempertimbangkan konteks domestik maupun internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam berperan kuat dalam membentuk narasi dan orientasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Iran–Israel. Prinsip keadilan ('adl) menjadi dasar moral dalam menolak segala bentuk agresi dan pelanggaran hukum internasional. Dimensi universal 'adl menjadi sangat penting dalam konteks hubungan internasional. Islam menegaskan bahwa keadilan berlaku tanpa diskriminasi, bahkan terhadap pihak yang dipandang musuh sekalipun (Wahidin et al., 2025, p. h. 64). Surah al-Mā'idah ayat 8 menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اٰغْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى  
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu *Keadilan* terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. al-Mā'idah: 8).

Ayat tersebut memperluas horizon keadilan melampaui batas agama, etnis, maupun politik, menjadikannya prinsip etika global. Dalam kerangka kebijakan luar negeri, perintah universal ini meneguhkan 'adl sebagai norma yang mendorong Indonesia untuk memperjuangkan tatanan dunia yang berlandaskan keadilan, solidaritas, dan penghormatan pada kemanusiaan. Dalam berbagai forum internasional, Indonesia secara konsisten menegaskan pentingnya penyelesaian damai melalui jalur diplomasi. Hal ini tercermin dalam pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia tahun 2025 yang mengutuk serangan Israel terhadap Iran sebagai pelanggaran Piagam PBB dan hukum internasional.

Konsep *ukhuwwah Islamiyah* merupakan salah satu pendorong paling kuat di balik lahirnya solidaritas dalam dunia Muslim. Ikatan ini bukan hanya bersifat spiritual, melainkan juga sosial,

yang melampaui batas-batas negara-bangsa modern (Ali et al., 2024). Dengan demikian, ukhuwah hadir sebagai sebuah kesadaran kolektif yang menghubungkan umat Islam dalam satu ikatan persaudaraan universal, yang tidak terbatas oleh sekat geografis maupun politik. Posisi Indonesia sebagai negara demokrasi dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sekaligus tidak terikat pada aliansi militer mana pun di kawasan, menempatkannya dalam posisi yang unik. Modalitas ini memberikan Indonesia kapasitas signifikan untuk bertindak sebagai penengah yang jujur (*honest broker*), terutama dalam konflik yang melibatkan sesama negara Muslim (Basyuni, 2016). Prinsip politik luar negeri *bebas-aktif* menjadi fondasi yang memungkinkan Indonesia menjalin komunikasi dan menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang berseberangan, sebuah prasyarat penting bagi keberhasilan proses mediasi.

Salah satu contoh konkret dari peran ini terlihat dalam konflik antara Iran dan Arab Saudi. Ketika ketegangan antara dua kekuatan regional tersebut memuncak pada tahun 2016, Indonesia tidak bersikap pasif. Melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Indonesia menawarkan diri untuk berperan sebagai mediator dengan melakukan diplomasi intensif, termasuk komunikasi langsung dengan pejabat tinggi di Teheran dan Riyadh serta negara-negara lain di kawasan (Purwanto, 2016). Sikap ini berakar pada prinsip persahabatan dengan kedua negara, sekaligus didorong oleh kepentingan yang lebih luas untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Pertimbangan tersebut bukan hanya terkait dengan keamanan regional, tetapi juga menyangkut kepentingan nasional Indonesia, khususnya perlindungan pekerja migran dan keberlanjutan hubungan ekonomi Ibid.

Prinsip *ukhuwah Islamiyah* menghadapi ujian terberatnya ketika konflik justru terjadi di antara sesama negara atau kelompok Muslim. Dalam situasi semacam ini, diplomasi Indonesia dituntut untuk bersikap sangat hati-hati. Alih-alih menampilkan aktivisme diplomasi yang vokal, Indonesia cenderung mengambil pendekatan "*wait and see*" atau menunggu perkembangan situasi sebelum menentukan langkah yang lebih tegas (D. Setiawati, 2017). Pendekatan ini menunjukkan bagaimana idealisme ukhuwah seringkali harus dikalibrasi terhadap realitas geopolitik yang kompleks.

- a. Dilema di Suriah: Konflik Suriah menempatkan Indonesia pada posisi yang sulit. Di satu sisi terdapat pemerintahan Bashar al-Assad yang mendapat dukungan dari Iran, sementara di sisi lain terdapat kelompok oposisi yang disokong oleh Arab Saudi dan negara-negara Teluk. Hubungan baik yang dimiliki Indonesia dengan kedua kubu menimbulkan risiko besar jika Indonesia mengambil posisi yang terlalu tegas atau berpihak Ibid. Oleh karena itu, prinsip non-intervensi dalam urusan domestik negara lain menjadi pegangan utama. Dalam konteks ini, Indonesia lebih memilih menekankan seruan untuk dialog dan mengarahkan peran diplomatiknya pada penyaluran bantuan kemanusiaan.
- b. Dilema di Yaman: Situasi serupa juga terlihat dalam konflik di Yaman. Ketika Arab Saudi membentuk koalisi militer untuk melakukan intervensi, Indonesia secara tegas menolak untuk ikut serta (BBC News Indonesia, 2023). Keputusan ini sepenuhnya selaras dengan prinsip politik luar negeri *bebas-aktif*, yang menolak keterikatan dalam pakta militer. Namun, sikap tersebut sekaligus mencerminkan keengganan Indonesia untuk terlibat dalam konflik bersenjata yang kompleks antar sesama negara Muslim. Fokus utama Indonesia justru diarahkan pada aspek kemanusiaan, berupa keprihatinan terhadap penderitaan rakyat sipil dan seruan untuk penyelesaian damai, sembari tetap menjaga netralitas diplomatik.

Dengan demikian, dilema Suriah dan Yaman memperlihatkan bahwa penerapan ukhuwah Islamiyah dalam praktik diplomasi tidak selalu linear. Nilai ukhuwah tetap menjadi inspirasi moral,

tetapi implementasinya harus menyesuaikan dengan pertimbangan stabilitas hubungan diplomatik, prinsip non-intervensi, serta kepentingan nasional Indonesia yang lebih luas.

Nilai amar ma'ruf nahi munkar berfungsi sebagai prinsip moral aktif yang mendorong Indonesia untuk menyerukan perdamaian dan mengadvokasi penghentian kekerasan. Dalam konteks ini, Indonesia berperan sebagai suara moral di forum PBB dan OKI, mendorong negara-negara Muslim untuk tidak terjebak dalam polarisasi geopolitik. Ketiga nilai ini secara bersamaan membentuk apa yang disebut sebagai 'Islamic normative diplomacy' – sebuah model diplomasi yang berakar pada etika Islam namun diimplementasikan dalam kerangka politik luar negeri modern.

Diplomasi Indonesia untuk Palestina memiliki dua dimensi: vokal di tingkat internasional dan nyata di tingkat kemanusiaan. Keduanya berakar pada nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, persaudaraan, dan tolong-menolong, serta memperlihatkan bagaimana identitas moral bangsa dapat diwujudkan dalam praktik diplomasi global. Untuk memberikan gambaran yang sistematis, tabel berikut memetakan berbagai aksi diplomasi Indonesia untuk Palestina dalam dekade terakhir dan menghubungkannya dengan norma-norma Islam yang mendasarinya.

**Tabel 1: Matriks Implementasi Norma Islam dalam Kebijakan Indonesia terhadap Palestina (Periode 2014-2025)**

| Tahun / Periode | Arena Diplomasi      | Bentuk Aksi/Kebijakan                                                                                                         | Kutipan/Sumber Kunci                                    | Norma Islam yang Diimplementasikan                                   |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2014-2018       | Bilateral / Domestik | Pembukaan Konsulat Kehormatan RI di Ramallah; Peningkatan <i>capacity building</i> (Kementerian Sekretariat Negara, n.d.)     | "Mendekatkan diri dengan rakyat Palestina" Ibid.        | <i>Ukhuwah</i> (Persaudaraan), <i>Ta'awun</i> (Tolong-menolong)      |
| 2018            | OKI                  | Mengusulkan 6 poin sikap OKI, termasuk menolak pemindahan kedubes ke Yerusalem (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2017) | "Two-state solution adalah satu-satunya solusi" Ibid.   | <i>Adl</i> (Keadilan), <i>Ukhuwah</i> (Persaudaraan)                 |
| 2020            | PBB                  | Menyoroti peningkatan Islamofobia dan mengaitkannya dengan isu Palestina di Sidang Umum PBB (Idyatama, 2025)                  | Menekankan pentingnya penghormatan terhadap agama Ibid. | Toleransi, Perlindungan Agama                                        |
| 2023-2024       | PBB / Domestik       | Mendorong Sidang Khusus PBB (Isdarmadji, 2023);                                                                               | "Konflik Palestina adalah konflik kemanusiaan"          | Bantuan <i>Mustad'afin</i> (Menolong yang tertindas), <i>Ta'awun</i> |

| Tahun / Periode | Arena Diplomasi | Bentuk Aksi/Kebijakan                                                                                                                      | Kutipan/Sumber Kunci                                   | Norma Islam yang Diimplementasikan                  |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                 |                 | Mengirim bantuan kemanusiaan besar-besaran ke Gaza                                                                                         |                                                        |                                                     |
| 2025            | PBB             | Presiden Prabowo menegaskan komitmen solusi dua negara di PBB (Kementerian Luar Negeri RI, 2025); Menlu RI mengkritik DK PBB (Hakim, 2024) | "Dunia miliki Palestina Merdeka, kita mengakui Israel" | ' <i>Adl</i> (Keadilan), <i>Salam</i> (Perdamaian)  |
| Konsisten       | Multilateral    | Menjadi anggota Dewan HAM PBB dengan isu Palestina sebagai prioritas (Ayun et al., 2024)                                                   | "Strengthening the human rights ecosystem"             | ' <i>Adl</i> (Keadilan), Bantuan <i>Mustad'afin</i> |

Prinsip bebas-aktif yang diwariskan sejak Konferensi Asia-Afrika 1955 merupakan salah satu elemen paling dalam politik luar negeri Indonesia. Pada masa Jokowi (2023–2024), prinsip konsisten ini diwujudkan lewat keaktifan diplomasi multilateral (PBB, OKI) dengan fokus pada isu Palestina dan penolakan agresi Israel. Pada masa Prabowo (2025), prinsip ini tetap dipertahankan, namun strategi adaptasi terlihat melalui pendekatan yang lebih pragmatis, termasuk penguatan hubungan bilateral strategis dengan negara besar yang berperan dalam konflik Timur Tengah (Negara & Indonesia, 2025).

Sebagai forum internasional paling inklusif, PBB menjadi panggung utama bagi Indonesia untuk menunjukkan kekuatan normatifnya: berpegang pada hukum internasional, mendorong perdamaian, dan mengajukan gagasan yang bisa dikerjakan, termasuk saat menanggapi konflik Iran–Israel. Di sini, Indonesia bukan sekadar hadir; Indonesia aktif membentuk arah pembahasan dan menawarkan jalur diplomatik yang konkret.

Pidato perdana Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB (September 2025) menandai penegasan arah baru yang lebih berani namun tetap pragmatis. Presiden mengutuk kekerasan terhadap warga sipil di Gaza, kembali menegaskan dukungan pada solusi dua negara, dan menyatakan kesiapan Indonesia mengirim pasukan penjaga perdamaian di bawah mandat PBB (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2025). Beliau juga membingkai isu Palestina sebagai soal keadilan mendasar, sekaligus ujian bagi kredibilitas PBB. Unsur paling menonjol adalah tawaran pengakuan bersyarat: “Indonesia siap mengakui Negara Israel setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Negara Palestina” (Sekretariat Presiden, 2025). Ini langkah bersejarah. Untuk pertama kalinya, Indonesia tidak hanya menyampaikan dukungan moral, tetapi juga mengusulkan kerangka diplomasi yang jelas dan transaksional.<sup>121</sup> Dengan demikian, posisi Indonesia bergeser dari pendukung setia menuju calon fasilitator aktif penyelesaian akhir menjadikan pengakuan diplomatik sebagai *bargaining chip* untuk mendorong lahirnya negara Palestina.

Langkah ini mencerminkan diplomasi negara menengah yang canggih. Di satu sisi, Indonesia menyelaraskan diri dengan arus internasional, menyebut negara-negara seperti Prancis, Kanada, dan Inggris yang mengakui Palestina (Adji, 2025). Di sisi lain, tawaran bersyarat menempatkan Indonesia pada peran kepemimpinan yang khas: pragmatis, bersedia bertransaksi demi tujuan damai, dan bukan sekadar mengulang retorika.<sup>25</sup> Hasilnya, Indonesia tidak hanya relevan di Asia Tenggara, tetapi juga dipandang sebagai pemain potensial dalam proses perdamaian Timur Tengah area yang sarat kepentingan kekuatan besar.

Perbandingan antara dua periode pemerintahan menunjukkan kontinuitas dan adaptasi kebijakan. Pada masa Presiden Joko Widodo (2023–2024), diplomasi Indonesia menonjolkan aspek normatif-humanitarian, menekankan hukum internasional, dan kerja sama multilateral. Jokowi menggunakan citra Indonesia sebagai negara Muslim moderat untuk memperkuat soft power dalam forum global. Sementara pada masa Presiden Prabowo Subianto (2025), pendekatan kebijakan luar negeri lebih pragmatis, berfokus pada stabilitas ekonomi, keamanan energi, dan perlindungan warga negara di Timur Tengah. Meskipun demikian, kedua pemerintahan mempertahankan prinsip bebas–aktif dan komitmen pada perdamaian global.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat pandangan konstruktivisme bahwa identitas keislaman Indonesia menjadi bagian integral dari perilaku diplomatik negara. Nilai-nilai Islam bukan atribut kultural, tetapi juga sumber legitimasi internasional yang meningkatkan kredibilitas diplomasi Indonesia di mata dunia. Selain itu, teori Foreign Policy Analysis menunjukkan bahwa aktor-aktor domestik seperti Presiden, Kementerian Luar Negeri, DPR, dan organisasi Islam besar (NU, Muhammadiyah) memainkan peran signifikan dalam membentuk kebijakan luar negeri yang bernuansa Islam. Tekanan publik Muslim yang kuat terhadap isu Palestina dan solidaritas terhadap Iran memperkuat hanya konsistensi kebijakan Indonesia untuk mendukung perdamaian.

Dari sisi kontinuitas kebijakan, prinsip bebas–aktif tetap menjadi landasan utama. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya reorientasi strategis. Jika pada masa Jokowi Indonesia lebih banyak menggunakan pendekatan multilateral berbasis norma, maka pada masa Prabowo diplomasi diarahkan pada keseimbangan antara idealisme dan pragmatisme. Adaptasi ini mencerminkan kematangan politik luar negeri Indonesia dalam mengelola tekanan global tanpa kehilangan jati diri sebagai negara Muslim demokratis.

Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan akademik dalam literatur tentang hubungan agama dan diplomasi konflik Iran-Israel terhadap kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam nilai-nilai Islam yaitu *al-ukhuwah* (persaudaraan), *al-'adalah* (keadilan), dan *amru bil-ma'ruf wa nahyu 'anil-munkar*. Serta memberikan kontribusi praktis dalam memahami reorientasi kebijakan luar negeri Indonesia di era Jokowi dan Prabowo dalam menghadapi krisis global kontemporer.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Islam memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan luar negeri Indonesia, baik sebagai identitas normatif maupun sebagai instrumen diplomasi strategis. Nilai-nilai keadilan, ukhuwah, dan amar ma'rūf nahi munkar menjadi dasar moral yang memperkuat citra Indonesia sebagai negara Muslim demokratis yang berpihak pada perdamaian.

Prinsip bebas–aktif terbukti tetap konsisten, namun mengalami reorientasi dari pendekatan idealistik ke arah pragmatis seiring dinamika geopolitik dan kebutuhan domestik. Diplomasi Indonesia dalam konflik Iran–Israel menunjukkan bagaimana nilai Islam dapat dioperasionalkan

secara substansial dalam praktik kebijakan luar negeri, memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan moral dan mediator potensial di kancah internasional.

Islam berfungsi ganda: sebagai legitimasi moral dan instrumen soft power dalam diplomasi multilateral Indonesia. Pada era Joko Widodo, kebijakan lebih bercorak normatif-humanitarian, sementara pada era Prabowo orientasi pragmatis lebih menonjol dengan fokus pada kepentingan energi, stabilitas ekonomi, dan perlindungan warga negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adji, R. (2025). *Prabowo lauds countries recognizing Palestinian statehood*—ANTARA News. <https://en.antaranews.com/news/381648/prabowo-lauds-countries-recognizing-palestinian-statehood>
- Ali, Z., Anjum, G. M., Iqbal, J., & Ahmad, I. (2024). The role of Islamic values in promoting social justice and community welfare. *International Research Journal of Management and Social Sciences*, 5(1), 575–585.
- Alles, D. (2015). *Transnational Islamic actors and Indonesia's foreign policy: Transcending the state*. Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315764986/transnational-islamic-actors-indonesia-foreign-policy-delphine-alles>
- Amara, A. N. (2025, June 23). Legislatur Minta Indonesia Ambil Peran di Tengah Panasnya Konflik Iran-Israel. *Bisnis.Com*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20250623/19/1887436/legislatur-minta-indonesia-ambil-peran-di-tengah-panasnya-konflik-iran-israel#:~:text=%E2%80%9CKita%20tidak%20boleh%20diam,23%2F6%2F2025>
- Aqsha, M. H. (2023, June 12). Islam dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia, Relevankah? *JurnalPost*. <https://jurnalpost.com/islam-dan-kebijakan-luar-negeri-indonesia-relevankah/53120/>
- Ayun, S. Q., Istifarin, A., Hidayatullah, A. D., & Soleh, B. (2024). Indonesia's diplomatic actions in the Israel-Palestine Conflict. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi Tentang Kajian Dan Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity, Nasionalism Dan Integrity*, 10(2).
- Basyuni, M. M. (2016). Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Timur Tengah (Kasus Konflik Israel-Palestina). *Universitas Gajah Mada: Yogyakarta*.
- BBC News Indonesia. (2023, December 20). *Yaman: Siapa itu kelompok pemberontak Houthis dan kenapa mereka menyerang kapal-kapal kargo yang menuju Israel?* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn043yzq3z5o>
- Blankenship, B. (2024, April 12). Why Israel is risking a dramatic escalation with Iran. *RT News*. <https://www.rt.com/news/595700-israel-bomb-iran-consulate-damascus/>
- Correa-Lopera, G. (2019). Demand of direct democracy. *European Journal of Political Economy*, 60, 101813.
- Costa, G. D. (2025a, June 17). Indonesia calls for restraint, seeks de-escalation in Iran-Israel conflict. *Indonesia Business Post*. <https://indonesiabusinesspost.com/4530/capitol-influence-and-lobbying/indonesia-calls-for-restraint-seeks-de-escalation-in-iran-israel-conflict>
- Costa, G. D. (2025b, June 19). Countries condemn Israeli attacks on Iran, call for immediate ceasefire. *Indonesia Business Post*. <https://indonesiabusinesspost.com/4551/geopolitics-and-diplomacy/countries-condemn-israeli-attacks-on-iran-call-for-immediate-ceasefire#:~:text=Indonesia%E2%80%99s%20Foreign%20Ministry%20further%20noted,the%20Ministry%20declared%20in%20Jakarta>

- Elbahnasawy, N. G. (2020). Democracy, political instability, and government tax effort in hydrocarbon-dependent countries. *Resources Policy*, 65, 101530.
- Ghiselli, A. (2025, August 5). Did the Israel-Iran war expose China's Middle East policy? *Atlantic Council*. <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/did-the-israel-iran-war-expose-chinas-middle-east-policy/>
- Hakim, I. A. (2024). *Isi Pidato Lengkap Retno Marsudi di Debat Terbuka PBB, Bicarakan Palestina dan Kritik Dewan Keamanan*. <https://www.kompas.tv/internasional/541237/isi-pidato-lengkap-retno-marsudi-di-debat-terbuka-pbb-bicarakan-palestina-dan-kritik-dewan-keamanan?page=all>
- Hardy, C., Harley, B., & Phillips, N. (2004). Discourse analysis and content analysis: Two solitudes? *Qualitative & Multi-Method Research*, 2(1), 19–22.
- idyatama, E. (2025). *Mimbar Sidang PBB Jadi Saksi: RI Tak Pernah Diam Demi Palestina-Islam*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250923125547-128-669402/mimbar-sidang-pbb-jadi-saksi-ri-tak-pernah-diam-demi-palestina-islam>
- Isdarmadji, N. Q. (2023, October 25). *Indonesia Dorong PBB Gelar Sidang Khusus Selesaikan Konflik Gaza*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/indonesia-dorong-pbb-gelar-sidang-khusus-selesaikan-konflik-gaza>
- Kementerian Kesehatan RI. (2023, November 6). *Bantuan Kemanusiaan Indonesia Untuk Palestina Lengkap Diberangkatkan*. <https://kemkes.go.id/id/%20bantuan-kemanusiaan-indonesia-untuk-palestina-lengkap-diberangkatkan>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2025). *Indonesia Tegaskan Komitmen Solusi Dua Negara, Presiden Prabowo Ajak Dunia Akhiri Tragedi Gaza*. <https://kemlu.go.id/berita/indonesia-tegaskan-komitmen-solusi-dua-negara-presiden-prabowo-ajak-dunia-akhiri-tragedi-gaza?type=publication>
- Kementerian Sekretariat Negara. (n.d.). *Menlu RI Melantik Konsul kehormatan RI Ramallah di Amman / Sekretariat Negara*. Retrieved September 26, 2025, from [https://www.setneg.go.id/baca/index/menlu\\_ri\\_melantik\\_konsul\\_kehormatan\\_ri\\_ramallah\\_di\\_amman](https://www.setneg.go.id/baca/index/menlu_ri_melantik_konsul_kehormatan_ri_ramallah_di_amman)
- Khong, Y. F., & Liow, J. C. (2025, June 24). Southeast Asia Is Starting to Choose. *The Council on Foreign Relations, Inc*. <https://www.foreignaffairs.com/china/southeast-asia-starting-choose-khong-liow>
- Maloney, S. (2025, August 6). Iran's Dangerous Desperation. *The Council on Foreign Relations, Inc*. <https://www.foreignaffairs.com/iran/irans-dangerous-desperation>
- Maulidia, H. (2022). *Dinamika Islam dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2022 (Studi Kasus Dukungan Indonesia terhadap Proses Perdamaian di Afghanistan)* [Master's Thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74852>
- Negara, K. S., & Indonesia, R. (2025). *Di St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, Presiden Prabowo Tegaskan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia*. [https://www.setneg.go.id/baca/index/di\\_spief\\_2025-presiden-prabowo-tegaskan-politik-luar-negeri-bebas-aktif-indonesia](https://www.setneg.go.id/baca/index/di_spief_2025-presiden-prabowo-tegaskan-politik-luar-negeri-bebas-aktif-indonesia)
- Neumann, I. B. (2008). Discourse Analysis. In A. Klotz & D. Prakash, *Qualitative Methods in International Relations*. Palgrave Macmillan.
- Peterson, D. (2025). Indonesia and the Palestinian Cause. *Ifri Memos*, 1–11.

- Prameswari, L. B. (2025, June 24). MUI Serukan Indonesia Jadi Mediator Perdamaian Konflik Iran-Israel. *ANTARA*. <https://www.antaranews.com/berita/4922157/mui-serukan-indonesia-jadi-wasit-perdamaian-atas-konflik-iran-israel>
- Purwanto, H. (2016). *Indonesia offers to mediate in Iran-Saudi Arabia conflict*—*ANTARA News*. <https://en.antaranews.com/news/102386/indonesia-offers-to-mediate-in-iran-saudi-arabia-conflict>
- Rithcie, J., & Lewis, J. (2003). *Qualitative Research Practice*. Sage Publications.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2017). *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia / Berbicara di KTT Luar Biasa OKI, Presiden Jokowi Sampaikan Enam Usulan*—*Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. <https://setkab.go.id/berbicara-di-ktt-luar-biasa-ok-presiden-jokowi-sampaikan-enam-usulan/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2025). *Presiden Prabowo dan PM Wong Sepakat Dorong Solusi Damai untuk Gaza, Iran-Israel, hingga Krisis Myanmar* / *Sekretariat Negara*. [https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden\\_prabowo\\_dan\\_pm\\_wong\\_sepakat\\_dorong\\_solusi\\_damai\\_untuk\\_gaza\\_iran\\_israel\\_hingga\\_krisis\\_myanmar](https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_dan_pm_wong_sepakat_dorong_solusi_damai_untuk_gaza_iran_israel_hingga_krisis_myanmar)
- Sekretariat Presiden (Director). (2025, September 23). *Presiden Prabowo Hadiri High-Level UN Conference on the Two State Solution, New York, 22 Sep 2025* [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=qvFKVehlsWI>
- Setiawati, D. (2017). Dilemma Indonesia Dan Hambatan Asean Untuk Menjalankan Peranan Dalam Penyelesaian Konflik Timur Tengah. *Jurnal Hukum UII*, 1–3.
- Setiawati, S. M. (2024). The role of Indonesian government in middle east conflict resolution: Consistent diplomacy or strategic shifts? *Frontiers in Political Science*, 6. <https://www.frontiersin.org/journals/political-science/articles/10.3389/fpos.2024.1304108/full>
- Stutzer, A., Baltensperger, M., & Meier, A. N. (2019). Overstrained citizens? The number of ballot propositions and the quality of the decision process in direct democracy. *European Journal of Political Economy*, 59, 483–500.
- Wahidin, L. O., Sholihah, H., Rifa'i, M., Gadafi, M., Nugroho, R. S., Amane, A. P. O., Mustopa, A., Halik, H., & Jalil, A. (2025). *Islam dan Keadilan Sosial: Perspektif Teologis dan Praktis*. CV. Gita Lentera.
- Zaini, M. (2019). Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Sosial. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 25(1), 54–67.